

**PENGARUH PROGRAM PNPM MANDIRI TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DUSUN  
PAMBUSU DESA ROMPU KABUPATEN  
LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**Ricky Rahman**

14 16 4 0119

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**PENGARUH PROGRAM PNPM MANDIRI TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DUSUN  
PAMBUSU DESA ROMPU KABUPATEN  
LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomu Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**Ricky Rahman**  
14 16 4 0119

**Pembimbing :**

- IAIN PALOPO**
- 1. Ilham, S.Ag., M.A**
  - 2. Mujahidin, Lc., M.E**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ricky Rahman  
NIM : 14 16 4 0119  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang diajukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan

**IAIN PALOPO**  
**Ricky Rahman**  
NIM 14 16 4 0119

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pengaruh Program PNPM Mandiri terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara* yang ditulis oleh *Ricky Rahman* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) *141640119* mahasiswa program Studi *Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang telah dimunaqasyahkan pada hari tanggal *Miladiyah* bertepatan dengan *Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Palopo,

### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI, M.A. Sekretaris Sidang (.....)
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI, M.A. Penguji I (.....)
4. Dr. Adzan Noor Bakri, SE. Sy., MA. Ek. Penguji II (.....)
5. Ilham, S. Ag., M.A. Pembimbing I (.....)
6. Mujahiddin, LC., M.E Pembimbing II (.....)

### Mengetahui

IAIN PALOPO

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.  
NIP 19610208 199403 2 001

Dr. Fasiha, S.EI., M.EI  
NIP 19810213 200604 02

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. (أما بعد)

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul : “*Pengaruh Program PNPM Mandiri terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara*”, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah SWT, kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tuaku Ayahanda, Ibunda dan Adik-adikku yang

selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi dan seluruh rumpun keluarga besar yang selalu memberikan senyum semangat untuk penulis.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta Wakil Rektor I, II, dan III Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Hj. Ramlah M., M.M Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Wakil Dekan I, II, dan III Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. Fasiha, M.EI Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan dukungan dan motivasi.
4. Ilham, S.Ag., M.A dan Mujahidin, Lc., M.E selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dengan baik dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. Muh. Ruslan Abdullh, S.EI., M.A. dan Dr. Adzan Noor Bakri, SE. Sy., M.A, Ek Selaku penguji I dan II yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi.
6. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

7. Rusdi S.Pd. Selaku kepala desa Rompu yang telah memberikan izin dan bekerja sama dalam melakukan penelitian ini.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik dan membantu penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Palopo, dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua teman-teman seperjuanganku, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2014, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Rahman dan Bunda Bungadia yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang saya ucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya, mudah-mudahan Allah swt mengumpulkan kita di surga-Nya kelak.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

**IAIN PALOPO**

Palopo, Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

#### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah



ظ	Za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفًا : *kaiifa* BUKAN *Kayfa*  
 هَوْلًا : *hauila* BUKAN *Hawla*  
 ٔ

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ٔ (*alif lamma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

سَمْسًا : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)  
 زَلْزَلًا : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)  
 ٔ  
 فَسْفَلًا : *al-falsalāh*  
 ٔ  
 دَلِيلًا : *al-bilādu*

### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
وَوَوَو	<i>Fathahdan alif,</i> <i>fathah dan waw</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
يِي	<i>Dhammah dan ya</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

تَام : mâtâ  
 رَامر : ramâ  
 تَوَمي : yamûtu

#### 5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 6. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

اَنْبَرٌ : *rabbanâ*  
اَنْجِنُ : *najjaânâ*  
اَحْسَ : *al-ḥaqq*  
اَحْجَلٌ : *al-ḥajj*  
اَمْعَنُ : *nu'ima*  
اَوْدَعُ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (كس), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

اِيْلُ ع : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)  
اِيْسِرُ ع : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

اَمْوَاتٌ : *ta'murūna*  
اَنْوَالٌ : *al-nau'*  
اَسْيُوشٌ : *syai'un*  
اَمْوَاتٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهنَّبِيْدِ      *dînullah*      للهَابِ      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

اللهَ ۞ مَحْرِيْفَمَه      *hum fi rahmatillâh*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

### A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahūwata 'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihiwasallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salâm</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
W	= Wafat tahun

Q.S            = Qur'an Surah

HR            = Hadits Riwayat



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batas Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
B. Kajian Pustaka.....	16
1. Tinjauan Umum Tentang Pengaruh .....	16
2. Tinjauan Umum Tentang PNPM .....	18
3. Kesejahteraan Masyarakat .....	30
C. Kerangka Pikir .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian.....	34
C. Definisi Istilah.....	35
D. Desain Penelitian.....	35
E. Data dan Sumber Data .....	36
F. Instrumen Penelitian.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	37
I. Teknik Analisis Data.....	37



<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>37</b>
A. Deskripsi Data.....	38
B. Pembahasan.....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Simpulan .....	61
B. Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS ash-Sharh / 94 :7 .....	4
Kutipan Ayat 2 QS al-Mulk /67:15 .....	5



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR HADIS

Hadis Riwayat Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu .....	7
---	---



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sejarah Desa Rompu.....	41
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	43
Tabel 4.3 Mata Pencarian.....	44
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Desa .....	45
Tabel 4.5 Pembagian Wilayah Desa .....	46



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rompu.....	46



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Penelitian

Lampiran 2 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 3 Persetujuan Pembimbing

Lampiran 4 Surat Izin Meneliti

Lampiran 5 Foto Dokumentasi

Lampiran 6 Wawancara

Lampiran 7 Verifikasi

Lampiran 8 Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas

Lampiran 10 Riwayat Hidup



# IAIN PALOPO

## ABSTRAK

**RICKY RAHMAN, 2021.** “*Pengaruh Program PNPM Mandiri terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham dan Mujahidin.

Skripsi ini membahas tentang “Pengaruh Program PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh program PNPM terhadap Kesejahteraan masyarakat di Desa Rompu, serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam menyalurkan program PNPM di Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara serta Studi Pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu, pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah didapatkan adalah sebagai berikut: Pengaruh Program PNPM Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara memberikan pengaruh yang sangat baik karena dengan adanya program PNPM tersebut kondisi perekonomian masyarakat di Desa Rompu jauh lebih baik dari sebelumnya serta infrastruktur seperti jalan tani dan pembangunan PAUD serta drainase memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Rompu. Adapun Faktor pendorong dan penghambat dalam menyalurkan program PNPM Mandiri terhadap Masyarakat di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yaitu faktor pendukung salah satunya adalah tersedianya program dapat membantu masyarakat Desa seperti Koperasi Simpan Pinjam, selain itu kontribusi masyarakat dan Pemerintah juga menjadi faktor pendorong yang sangat penting dalam menyalurkan program PNPM Mandiri di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan faktor penghambat dalam penyaluran program PNPM adalah cuaca serta kecemburuan sosial yang terjadi antar masyarakat setempat Desa Rompu.

**Kata Kunci:** Pengaruh, Program PNPM Mandiri, Kesejahteraan Masyarakat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Pada era globalisasi saat ini, peningkatan kualitas masyarakat semakin meningkat. Baik kualitas masyarakat dari segi ekonomi, kesehatan maupun keamanan. Dibalik itu semua ternyata masih ada juga masyarakat yang masih mengalami kemiskinan. Kemiskinan terjadi terutama pada masyarakat yang berada dalam wilayah yang jauh dari perkotaan, seperti masyarakat yang memang mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Pada tataran politik, kebijakan publik merefleksikan upaya pengentasan kemiskinan, penggalangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan mereka. Menurut Nugroho mengemukakan argumennya bahwa politik menentukan arah pembangunan misalnya kemiskinan dapat dituntaskan jika politik menginginkan. Peran politik Pemerintah melahirkan kebijakan pembangunan pada aspek partisipasi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sependapat dengan hal itu, Todaro menjelaskan bahwa modernisasi di negara ketiga, selayaknya berorientasi pada kebijakan pembangunan yang memprioritaskan sektor ekonomi dengan harapan agar pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya memengaruhi sektor lainnya menjadi kondusif.<sup>1</sup>

Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan

---

<sup>1</sup> Nurjannah Nonci, *Implementasi Program Gernas Kakao: Studi Kebijakan Program Gernas Kakao di Kabupaten Luwu*, (Makassar: CV Sah Media 2017), 2



dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat di Indonesia, maka mulai awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.<sup>2</sup>

Program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya, dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestari dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan

---

<sup>2</sup> Wikipedia, *PNPM Mandiri Perdesaan*, [https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM\\_Mandiri\\_Pedesaan](https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan).

bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.<sup>3</sup>

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.<sup>4</sup>

Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam implementasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Angka jumlah penduduk miskin seperti yang dijelaskan di atas, disebut juga sebagai *Poverty Headcount Index* atau P0. Jumlah penduduk yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan ini sering juga disebut sebagai *Poverty Incidence*. Mengapa digunakan konsumsi dalam menghitung jumlah penduduk

---

<sup>3</sup> Solikatun, Supono, Yulia Masruroh, Ahmad Zuber, *Kemiskinan dalam Pembangunan*, Jurnal Analisa Sosiologi, April 2014, 3(1), 75

<sup>4</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Pnpm Mandiri Perdesaan*, <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pnpm-mandiri-perdesaan-51>, Diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

miskin? Setidaknya ada 3 (tiga) alasan utama: Pertama, dalam pelaksanaan survei, terutama bagi masyarakat miskin yang mempunyai pendapatan tidak tetap, lebih mudah menanyakan jenis barang (termasuk makanan) dan jasa yang telah dikonsumsi atau dibelanjakannya. Kedua, dengan diketahuinya jenis makanan yang dikonsumsi maka akan menjadi jauh lebih mudah untuk mengkonversinya menjadi tingkat kalori yang dikonsumsi. Informasi mengenai tingkat kalori yang dikonsumsi menjadi penting karena tingkat kemiskinan dihubungkan dengan seberapa besar kalori yang dikonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan ditetapkan 2100 kilo kalori per orang perhari sebagai batas kemiskinan. Ketiga, dalam kenyataannya, terutama bagi penduduk miskin yang tidak mempunyai tabungan, dalam jangka menengah tingkat pendapatan akan sama dengan tingkat konsumsi (belanja).<sup>5</sup>

Dalam Islam, kemiskinan dianggap sebagai musibah yang harus dihapuskan dari masyarakat. Sebab konsekuensi kemiskinan adalah kekafiran yang dianggap sebagai sebuah kejahatan. Allah SWT melalui Firman-Nya mengharuskan kepada umat manusia untuk menjauhi sikap malas dan memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bekerja dan berusaha untuk memperoleh rezeki dan anugerah dari-Nya. Bahkan dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa setiap individu haruslah mencari kesibukan dengan bekerja keras. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ash-Sarh / 94 : 7

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝

---

<sup>5</sup> Freddy H. Tulung, "Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II", (Jakarta: Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, 2011), 3-4.

Terjemahannya :

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.<sup>6</sup>

Islam tidak memandang kemiskinan sebagai masalah kultural karena Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk mencari nafkah. Firman Allah pada QS Al- Mulk /67: 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ  
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Terjemahannya :

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.<sup>7</sup>

Saat ini, ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang telah diluncurkan. Adapun program-program yang ditetapkan dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk penanggulangan kemiskinan adalah : Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), Program Asuransi Kesejahteraan Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan terakhir adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan yang terbaru adalah Program Bantuan Langsung Sementara (BLSM) yang merupakan program pemerintah untuk rakyat kurang

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 596.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 563.

mampu atau miskin sebagai bagian dari dampak kenaikan harga BBM pada tanggal 22 Juli 2013. Program-program pemerintah yang telah diluncurkan tersebut, ada beberapa program yang dilihat mempunyai kompetensi dalam mengurangi angka kemiskinan. Program tersebut mempunyai kompetensi karena melibatkan masyarakat sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan. Program tersebut salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM – Mandiri). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2007. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. PNPM Mandiri diarahkan menggunakan dan mengembangkan secara optimal kelembagaan masyarakat yang telah ada, sepanjang disepakati masyarakat dan bersifat terbuka bagi seluruh warga. Dimensi kelembagaan masyarakat meliputi proses pengambilan keputusan dan tindakan kolektif, organisasi, serta aturan main.<sup>8</sup>

Dari beberapa program yang telah diluncurkan oleh pemerintah guna untuk meminimalisir kesenjangan sosial dan kemiskinan maka dapat meringankan beban-beban masyarakat baik itu beban ekonomi maupun beban permasalahan lainnya. maka dengan adanya program tersebut seperti program PNPM di daerah perdesaan maka sangat membantu dari sisi perekonomian masyarakat dimana masyarakat dapat meminjam dana agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>8</sup> Aburizal Bakrie, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, (Jakarta: Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007) , 18

seperti yang telah di terangkan dalam salah satu hadis Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda :

كَانَ إِلَّا يَنْتَ مَرَّ رِضًا قَ مُسْلِمًا قُ رِضٌ ي م مُسْلِمٍ مِّنْ أُمَّةٍ  
مَرَّ كَصَدَقَتِهَا

Artinya :

Tiada seorang Muslim pun yang memberikan pinjaman kepada Muslim (lainnya) dua kali, melainkan nilainya seperti shadaqah sekali. (H.R. Ibnu Mas'ud).<sup>9</sup>

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2007. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. PNPM Mandiri diarahkan menggunakan dan mengembangkan secara optimal kelembagaan masyarakat yang telah ada, sepanjang disepakati masyarakat dan bersifat terbuka bagi seluruh warga. Dimensi kelembagaan masyarakat meliputi proses pengambilan keputusan dan tindakan kolektif, organisasi, serta aturan main.<sup>10</sup>

Pembangunan daerah pesisir kelautan selama tiga dasawarsa terakhir selalu diposisikan sebagai sektor pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan serta masyarakat pesisir bukan menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 275.

<sup>10</sup> Aburizal Bakrie, *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*, (Jakarta: Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007) , 18

Kondisi ini menjadi sangat ironis mengingat hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitis yang penting yakni lautan Pasifik dan Lautan Hindia - kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik di dunia. Sehingga secara ekonomis dan politis sangat logis jika bidang kelautan dan masyarakat pesisir dijadikan tumpuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Implikasi dari tidak adanya prioritas kebijakan pembangunan perikanan tersebut, mengakibatkan sangat minimnya prasarana perikanan di wilayah pesisir, terjadinya abrasi wilayah pesisir dan pantai, pengrusakan ekosistem laut dan terumbu karang, serta belum teroptimalkannya pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan. Bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, merupakan andalan dalam menjawab tantangan dan peluang tersebut. Pernyataan tersebut didasari bahwa potensi sumberdaya kejautan yang besar yakni 75% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah laut dan selama ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sumbangan yang sangat berarti dari sumberdaya kelautan tersebut, antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa dan pembangunan daerah. Dengan potensi wilayah laut yang sangat luas dan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang dimiliki Indonesia. kelautan sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif, keunggulan

kooperatif dan keunggulan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan dalam kiprah pembangunan nasional dimasa depan.<sup>11</sup>

Bersamaan dengan arus reformasi yang sedang berjalan, pemikiran ke arah ekonomi daerah menjadi perhatian baru dalam pengelolaan sumber daya masyarakat pesisir dan kelautan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa otonomi daerah yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan pemerataan hasilhasil pembangunan, justru dijadikan alat untuk membentuk rezim baru, tidak terkecuali dalam pengelolaan sumber daya masyarakat pesisir dan kelautan. Sekarang ini pembangunan daerah pesisir mulai menjadi fokus utama akibat terjadinya ketertinggalan pada masyarakat pesisir, karena selain terbatasnya dalam mengakses sumber permodalan dan lemahnya infrastruktur kelembagaan sosial ekonomi masyarakat di tingkat desa. Kondisi seperti ini membuat masyarakat pesisir semakin tertinggal. Untuk itu, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam kiprahnya berusaha meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat pesisir.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd), adalah salah satu bentuk kebijakan publik. Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik.

---

<sup>11</sup>TridoyoKusumastanto,“PemberdayaanSumberdayaKelautan,PerikananDan PerhubunganLautDalamAbadXxi”<http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20-%20tridoyo%20kusumastanto.pdf>.

<sup>12</sup>Kusumastanto,T.1998.*PengelolaanSumberdayaPesisirdanLautanBerbasis Masyarakat*. PKSPL-IPB - Ditjen Bangda Depdagri.



“Sedangkan kebijakan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur urusan kesejahteraan sosial.”<sup>2</sup> Menurut Bridgeman dan Davis; Kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan yaitu : 1) Kebijakan sebagai tujuan. Kebijakan adalah a means to an end,- alat untuk mencapai sebuah tujuan. 2) Kebijakan sebagai pilihan atau tindakan yang legal Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karna dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam system pemerintahan. 3) Kebijakan sebagai hipotesis Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesisi mengenai sebab dan akibat.<sup>13</sup>

Permasalahan kemiskinan di Indonesia jelas tidak hanya menjadi milik perdesaan (petani, buruh tani, buruh nelayan, dan sebagainya) tetapi juga merupakan masalah perkotaan. *Parsudi Suparlan* mengemukakan bahwa masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut, tetapi juga melibatkan masalah-masalah sosial yang ada di perdesaan.<sup>14</sup>

Kemiskinan kota sebagai bagian dari kemiskinan nasional di Indonesia juga menjadi masalah yang cukup akut untuk ditangani. Sebagai warisan dan historis yang sudah berabad-abad, sejak munculnya kota itu sendiri, kaum papa perkotaan menjadi sebuah fenomena masalah sosial yang memprihatinkan, dengan tingkat penanggulangan yang lebih memprihatinkan, seolah-olah kemiskinan itu

---

<sup>13</sup> Pedoman PNPM-Mandiri Perdesaan tahun. 2013, 12

<sup>14</sup> Universitas Tarumanagara, *Pemulung di Jakarta*, (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 1995), 124.

sendiri bersifat abadi, lestari dan tidak bisa dirubah lewat aksi maupun reformas apapun. Kota-kota di Indonesia yang sekilas kelihatan sebagai simbol kemajuan dan budaya yang lebih maju dan seharusnya demikian, ternyata masih dipenuhi oleh problem kemiskinan dengan segala masalah sosial yang disebabkan atau berdampingan dengan masalah sosial lainnya.<sup>15</sup>

Dengan melihat latar belakang dan fenomena diatas, Hal ini yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Program PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara”**.

#### ***B. Batasan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi pokok permasalahan pada Pengaruh Program PNPM terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rompu.

#### ***C. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana Pengaruh Program PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara.
2. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam menyalurkan Program PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara.

#### ***D. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dilatar belakang masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>15</sup> Marliati A Harsono, “Kemiskinan Perkotaan: Penyebab dan Upaya Penanggulangannya”, *Makalah*, Institut Pertanian Bogor, 2005, 2.

1. Untuk mengetahui Pengaruh Program PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat pada penyaluran program PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Teoretis
  - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memahami tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
  - b. Sebagai bahan informasi bagi pembaca mengenai program penyaluran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
2. Praktis
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dimasa yang akan datang untuk lebih meningkatkan PNPM di tengah masyarakat.
  - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini masyarakat akan lebih mengenal dan memahami tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Wismoyo Ade Zaputro, dengan judul penelitian “*Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*”, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang memberikan program nasional pemberdayaan masyarakat di tengah-tengah masyarakat kecamatan lembang sangat efektif terbukti Keberhasilan program pengentasan kemiskinan ini sangat terkait dengan ketepatan dalam identifikasi target group dan target area. Target group menyangkut identifikasi mengenai kriteria dan karakteristik seseorang atau rumah tangga miskin dan daerah mana yang termasuk dalam kategori miskin seperti halnya kecamatan lembang yang bisa dikategorikan sebagai daerah sangat sulit mengingat letak geografisnya. Untuk itu perlu dilakukan program yang dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dikenal dengan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dan Dampak implementasi kebijakan dapat dilihat pada pembangunan fisik (sarana/prasarana) yang telah terlaksana di kecamatan lembang kabupaten pinrang yang memberikan manfaat yang sangat baik bagi roda kehidupan masyarakat dan peningkatan pendapatan serta pengentasan kemiskinan masyarakat di Kec. Lembang Kab. Pinrang.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wismoyo Ade Zaputro, “*Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*”.

Mustika Rihadini, *“Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan ( Pnpm Mp Spp ) Di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara Pada Periode 2010”*, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa Efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (PNPMMP SPP) di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara Pada Periode Tahun 2010 sudah cukup efektif namun belum maksimal, dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaannya yang sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan terlihat dari antusias partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya SPP, namun sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program ini belum dapat dicapai secara maksimal hal ini disebabkan karena adanya kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin (RTM) tetapi belum dapat mengakses pinjaman dana SPP ini.<sup>17</sup>

Israyanti, *“Strategi Komunikasi Dalam Mengimplementasikan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan (Studi di Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)”*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pengelola dan pelaku-pelaku yang terlibat dalam kegiatan SPP di Kelurahan

---

<sup>17</sup> Mustika Rihadini, *“Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Pnpm Mp Spp) Di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara Pada Periode 2010”*.

Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan beberapa langkah dalam merumuskan strategi komunikasi dimulai dari mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, pemilihan penggunaan media hingga peranan komunikator. Kemudian terkait dengan permasalahan penunggakan pada kelompok SPP di Kelurahan Tomoni dalam penelitian ditemukan bahwa ada beberapa hal penyebab terjadinya yaitu banyaknya lembaga keuangan yang berdiri, kurangnya controlling dari pemerintah setempat terhadap masyarakat penerima manfaat kegiatan SPP, tidak intensnya pertemuan kelompok diadakan dan kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait dengan program yang dijalankan. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada beberapa faktor pendukung dan penghambat selama proses pengimplementasian kegiatan SPP. Faktor pendukungnya dapat dilihat dari dukungan pemerintah baik itu kabupaten, kecamatan maupun desa, dukungan financial dan tentunya antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi. Sementara untuk faktor penghambatnya yaitu keterlambatan pencairan dana dan pembuatan laporan, ketidakaktifan dari pelaku-pelaku yang terkait dalam kegiatan SPP, serta sulitnya penjadwalan kegiatan untuk masyarakat.<sup>18</sup>

Baharuddin, *“Dampak Sosial Ekonomi proyek pemberdayaan PNPM Mandiri Pedesaan dalam kehidupan masyarakat di kelurahan Je’nebatu Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa”*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program pemerintah terkait dengan PNPM Mandiri Pedesaan di kelurahan

---

<sup>18</sup> Israyanti, *“Strategi Komunikasi Dalam Mengimplementasikan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Pedesaan (Studi di Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)”*, <http://repository.unhas.ac.id/>

Jenebatu Kabupaten Gowa cukup berdampak positif terhadap Sosial Ekonomi masyarakat di Kelurahan Jenebatu, Dalam bidang Ekonomi, misalnya PNPM Mandiri pedesaan memberikan bantuan modal simpan pinjam yang mana berdampak baik bagi masyarakat, dalam hal ini masyarakat diberikan modal untuk membuka usaha, namun dalam sektor pendidikan PNPM Mandiri Pedesaan memberikan bantuan terkait dengan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, dan pemberian Beasiswa Pendidikan bagi kelompok RTM, Selain itu dalam bidang kesehatan PNPM Mandiri Pedesaan memberikan Bantuan Makanan Bergizi dan Pengobatan Penyakit Menahun. PNPM Mandiri Pedesaan di Kelurahan Jenebatu pada dasarnya mengalami hambatan dalam pelaksanaannya termasuk dalam pendampingan yaitu kurangnya waktu untuk berpartisipasi, dan sosialisasi fasilitator yang kurang terhadap masyarakat, Selain itu dalam tahap pelaksanaan Kesibukan masyarakat cukup tinggi dan adanya Penuntutan gaji dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan.<sup>19</sup>

Terkait dengan penelitian terdahulu, itu berbeda dari penelitian ini. Pada penelitian ini akan membahas tentang Pengaruh Program PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwnu Utara.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Pengaruh**

#### **a. Pengertian Pengaruh**

---

<sup>19</sup> Baharuddin, “*Dampak Sosial Ekonomi proyek pemberdayaan PNPM Mandiri Pedesaan dalam kehidupan masyarakat di kelurahan Je’nebatu Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*”, <http://repository.unhas.ac.id/>

Menurut Kamus Besar Indonesia, “Pengaruh adalah gaya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.”<sup>20</sup> Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.<sup>21</sup>

Pengaruh dibagi menjadi dua, ada yang positif, adapula yang negatif, bila seseorang memberi pengaruh positif kepada masyarakat, ia bisa mengajak mereka untuk menuruti apa yang ia inginkan. Namun bila pengaruh seseorang kepada masyarakat adalah negatif, maka masyarakat justru akan menjauhi dan tidak lagi menghargainya.<sup>22</sup> WJS.Poerwardaminta berpendapat bahwa pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain (Poerwardaminta:731). Bila ditinjau dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada.

#### b. Konsep Pengaruh

Menurut Hugiono dan Poerwantana “pengaruh merupakan dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk atau merupakan suatu efek”,<sup>23</sup> sedangkan menurut Badudu dan Zain “Pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu

---

<sup>20</sup>Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), 849.

<sup>21</sup>Yosi Abdian Tindaon, *Pengertian Pengaruh*, <http://yosiabdiandtindaon.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-pengaruh.html>, diakses Pada 10 januari 2020 pukul 11.58

<sup>22</sup>Duniapelajar.com, *Pengertian Pengaruh Menurut Para Ahli*, <http://www.duniapelajar.com/2014/08/07/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli/>, diakses pada 10 Januari 2020 pukul 12.01

<sup>23</sup> Hugiono dan Poerwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Jakarta: PT Bina Aksara, 2000),47



terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuasaan orang lain”.<sup>24</sup> Sedangkan Louis Gottschalk mendefinisikan pengaruh sebagai suatu efek yang tegardan membentuk terhadap pikiran dan perilaku manusia baik sendiri-sendiri maupun kolektif.<sup>25</sup>

Berdasarkan konsep pengaruh di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu reaksi yang timbul (dapat berupa tindakan atau keadaan) dari suatu perlakuan akibat dorongan untuk mengubah atau membentuk sesuatu keadaan kearah yang lebih baik. Maka pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh pemanfaatan lingkungan belajar dan media cetak terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Jadi setelah mengetahui pemanfaatan lingkungan belajar dan media cetak, akan di ketahu ada pengaruh nya atau tidak terhadap prestasi belajar siswa.

## **2. Tinjauan Umum Tentang PNPM**

### **a. Pengertian PNPM**

PNPM adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi

---

<sup>24</sup> Babadu, J.S dan Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 131.

<sup>25</sup> Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, (Depok: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 2000),171.

payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya. Berdasarkan website resmi PNPM Mandiri Perdesaan, sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manifestasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

PNPM Mandiri adalah gerakan nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.<sup>26</sup>

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) adalah salah satu program nasional Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memperkuat kelembagaan masyarakat setempat dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik dalam rangka tujuan jangka panjang mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd), adalah salah satu

---

<sup>26</sup> Pedoman PNPM-Mandiri Perdesaan tahun. 2013, 12

bentuk kebijakan publik. Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. “Sedangkan kebijakan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur urusan kesejahteraan sosial.”<sup>27</sup> Menurut Bridgeman dan Davis; Kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan yaitu :

- (1) Kebijakan sebagai tujuan. Kebijakan adalah *a means to an end*, alat untuk mencapai sebuah tujuan.
- (2) Kebijakan sebagai pilihan atau tindakan yang legal Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karna dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam system pemerintahan.
- (3) Kebijakan sebagai hipotesis Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesisi mengenai sebab dan akibat.<sup>28</sup>

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Adapun menurut Edi Suharto istilah pemberdayaan dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :

- (1) Pemberdayaan sebagai sebuah proses Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

---

<sup>27</sup> Pedoman PNPM-Mandiri Perdesaan tahun. 2013,15

<sup>28</sup> Pedoman PNPM-Mandiri Perdesaan tahun. 2013,16

(2) Pemberdayaan sebagai sebuah tujuan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Sedangkan PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan *Millennium Development Goals (MDGs)* adalah kesepakatan global untuk mencapai target pembangunan bersama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan; pendidikan dasar untuk semua; kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; mengurangi angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi penyakit menular dan penyakit lainnya; menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.<sup>29</sup>

PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan

---

<sup>29</sup> Pedoman PNPM-Mandiri Perdesaan tahun. 2013, 19

pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

b. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya yang ada diluar lingkungannya serta mengolah sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

- (1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- (2) Pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan partisipatif.
- (3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local.
- (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana social dasar dan ekonomi masyarakat.
- (5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi tersebut PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Dan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya

kemandirian dan keberlanjutan setelah adanya tahapan pembelajaran yang dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

c. Tujuan dan Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dipertanian dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, penemuan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan pekerjaan.<sup>30</sup> Adapun Tujuan khusus meliputi:

- (1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Melembagakan pengelolaannya bergulir.
- (3) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
- (4) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan dan perbaikan lingkungan hidup.

---

<sup>30</sup> Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *PENJELASAN Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI PERDESAAN*, penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, 58.

- (5) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- (6) Memberikan kesempatan pada kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
- (7) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Nilai-nilai dasar mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, prinsip-prinsip yang dapat mendorong terwujudnya PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

- (1) Bertumpu pada pembangunan manusia, masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- (2) Otonomi, masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negative dari luar.
- (3) Berorientasi pada masyarakat miskin, segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- (4) Parsipatif, masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materi.
- (5) Demokratis, dalam pengambilan keputusan pembangunan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

(6) Transparan dan Akuntabel, masyarakat memiliki akses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative.

(7) Prioritas, masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengetasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan.

(8) Keberlanjutan, dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan politik, teknokratis dengan tetap mengacu pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.<sup>31</sup>

#### d. Pendekatan dan Ruang Lingkup PNPM Mandiri

##### (1) Pendekatan Program PNPM Mandiri

Pendekatan atau upaya-upaya nasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan :

(a) Menggunakan kecamatan sebagai fokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian program.

(b) Memposisikan masyarakat sebagai penentu atau pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal. Mengutamakan

---

<sup>31</sup> Direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, 6-7



nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.

- (c) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan ([pnpmmmandiri.org](http://pnpmmmandiri.org)).

## (2) Ruang Lingkup PNPM Mandiri

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi :

- (a) Penyediaan dan perbaikan prasarana atau sarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
- (b) Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini.
- (c) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
- (d) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik ([pnpmmmandiri.org](http://pnpmmmandiri.org)).

## e. Komponen Program dalam PNPM Mandiri

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

(1) Pengembangan Masyarakat

Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif dan pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, dan pemanfaatan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, operasional pendampingan masyarakat dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi, dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

(2) Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

(3) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal atau kelompok peduli lainnya agar mampu

menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

#### (4) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program (pnpm-mandiri.org).

#### f. Manfaat PNPM Mandiri

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kata manfaat diartikan sebagai “guna, faedah, laba, untung”.<sup>32</sup> Dengan demikian, manfaat berdasarkan pengertian masing-masing adalah guna, faedah, laba, untung yang didapat dari perihal mempraktikan atau hasil kerja menerapkannya. Dalam hal ini adalah guna atau keuntungan yaitu manfaat dari pelaksana PNPM Mandiri bagi masyarakat. Program PNPM Mandiri sangat berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sesuai dengan tujuan program tersebut, yaitu:

- (1) Membangun sarana prasarana pendukung bagi desa.
- (2) Meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kualitas kegiatan dengan penggunaan teknologi sederhana, meningkatkan ketrampilan

---

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Manfaat*, <https://kbbi.web.id/manfaat>, Diakses pada tanggal 29 januari 2020.

masyarakat desa dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan pemeliharaan prasarana, dalam teknis pelaksanaan.

- (3) Dalam bidang pendidikan PNPM Mandiri pedesaan juga ikut memperbaiki, karena bidang pendidikan merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih masyarakat secara demokratis pada Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa. Sejalan dengan prinsip Open Menu, semua jenis kegiatan formal maupun nonformal (termasuk pelatihan ketrampilan masyarakat). Hal itu bertujuan untuk mempercepat upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kapasitas rumah tangga miskin pedesaan melalui pelatihan bagi pemuda putus sekolah, ibu-ibu rumah tangga untuk menciptakan daya saing dan lapangan pekerjaan.
- (4) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- (5) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
- (6) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal.
- (7) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
- (8) Pengembangan jaringan kemitraan dalam masyarakat.

Cukup banyak manfaat yang bisa didapatkan dari PNPM Mandiri dengan program pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat dengan mengusahakan semua warganya bisa berpartisipasi langsung untuk membangun daerahnya, sehingga setiap warga bisa merasakan proses dalam pencapaian kesejahteraan yang direncanakan.

### 3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Wikipedia, sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Lebih jauh, menurut Wikipedia, dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Menurut Wikipedia pula, dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>33</sup>

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mencapai kesejahteraan kita perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu. Adapun indikator tersebut di antaranya adalah: Pertama. Jumlah dan pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.

---

<sup>33</sup> <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/03/17/indikator-kesejahteraan>

Dengan pendapatan yang mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

Kedua, pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumber daya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumber daya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.<sup>34</sup>

Ketiga, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

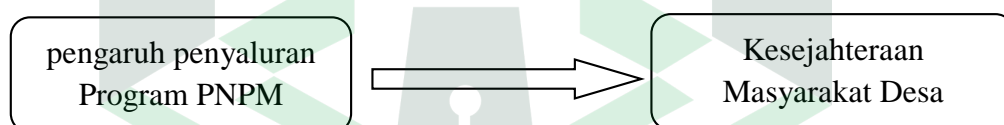
---

<sup>34</sup> <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/03/17/indikator-kesejahteraan>

Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya.<sup>35</sup>

### C. Kerangka Pikir

Evaluasi terhadap pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat perlu dilakukan untuk mengetahui apakah program tersebut telah berjalan efektif atau tidak. Sebuah program dikatakan berhasil jika program tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan proses yang telah ditentukan dan mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah untuk membantu mensejahterahkan masyarakat dalam meminimalisir angka kemiskinan melalui bantuan yang di berikan pemerintah dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan Gambar 2.1 Yang merupakan alur berpikir, Pemerintah mulai mencanangkan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2007 yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal, Pasca Bencana dan Generasi Sehat dan Cerdas. Khusus untuk pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan dengan dasar kebijakan Surat Keputusan Menkokesra No 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007, dan ditinjaklanjuti dengan kebijakan di tingkat

<sup>35</sup> <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/03/17/indikator-kesejahteraan>

Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pemerintah mengeluarkan Program PNPM dengan tujuan agar dapat membantu perekonomian masyarakat demi kesejahteraan masyarakat di negara ini. dengan beberapa program yang ada dalam PNPM dapat mengentaskan kemiskinan karena dalam program PNPM bukan hanya penyaluran dana tetapi beberapa bantuan yang berupa sebuah bangunan. Kebanyakan Program PNPM mandiri perdesaan berfokus pada kesejahteraan masyarakat desa.



**IAIN PALOPO**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Jenis Penelitian***

Jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian Kualitatif deskriptif yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut variabel dalam penelitian ini adalah Pengaruh Program PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. pada penelitian ini berfokus pada “Pengaruh program PNPM Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara” dan yang jadi objek utamanya adalah Program PNPM Mandiri di Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara.

### **C. Definisi Istilah**

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Program PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara”. Adapun definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu :

*Pengaruh* adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada. Pengaruh dibagi menjadi dua, ada yang positif, ada pula yang negatif. Bila seseorang memberi pengaruh positif kepada masyarakat, ia bisa mengajak mereka untuk menuruti apa yang ia inginkan. Namun, bila pengaruh seseorang kepada masyarakat adalah negatif, maka masyarakat justru akan menjauh dan tidak lagi menghargainya.

*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)* adalah salah satu program nasional Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memperkuat kelembagaan masyarakat setempat dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik dalam rangka tujuan jangka panjang mengentaskan kemiskinan di Indonesia. PNPM Mandiri adalah gerakan nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

### **D. Desain Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana untuk menjawab fenomena-fenomena yang ada dan dengan tujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena yang ada. Pada penelitian ini tidak begitu banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan diketahui dalam program PNPM

Mandiri di Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara, sehingga peneliti melakukan penelitian studi eksploratif untuk mengkaji lebih dalam mengenai penyaluran program PNPM Mandiri di Desa Rompu apakah terealisasi dengan baik dan sebagaimana mestinya.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara metode survei. Metode survei adalah metode penelitian yang mengambil sample dari populasi dan menggunakan kuesioner dan wawancara langsung kepada beberapa pemilik PNPM Mandiri yang mendapatkan bantuan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara. sebagai alat bantu dalam mengambil data primer yang pokok. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga terkait seperti Kantor PNPM serta jurnal-jurnal yang terkait dalam penelitian.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan penulis adalah pedoman wawancara dan dokumen. Instrumen penelitian inilah yang penulis gunakan dalam menggali data dari sumber-sumber informasi.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Supaya memperoleh data yang di perlukan, maka di lakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap kondisi lokasi penelitian.

b. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden..

c. Studi Pustaka adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah teori dan informasi yang erat hubungannya dengan materi peneliti. Hal ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, jurnal, artikel, dan sumber- sumber lainnya seperti internet dan lainnya.

#### **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara uji credibility, transferability, dependability dan confirmability. Untuk memeriksa keabsahan suatu data mengenai “Pengaruh Program PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara” berdasarkan data yang telah terkumpul, maka selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data yang meliputi Kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmasiabilitas.

#### **I. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk tetap dalam fokus penelitian, yaitu penulis menggambarkan masalah yang terjadi dengan menggunakan argument yang jelas dan memusatkan perhatian pada pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pembahasan

##### 1. Profil Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota kabupaten ini terletak di Masamba. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu, Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 450.000 jiwa. Namun setelah dimekarkan kembali dengan membentuk Kabupaten Luwu Timur (LUTIM) pada tahun 2003 maka saat ini luas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502,58 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 287.530 jiwa (2017).<sup>36</sup>

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502 km<sup>2</sup> dan secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada koordinat antara 20°30'45" sampai 2°37'30" Lintang Selatan dan 119°41'15" sampai 12°43'11" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Luwu Utara merupakan paling utara di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari pantai, dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian antara 0-3.016 MDPL Wilayah selatan berupa dataran rendah dan pantai yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone. Sebagian besar wilayah berupa pegunungan dengan gunung menjulang seperti Gunung Tolangi, Gunung Balease, Gunung Kabentonu, Gunung Kambuno, Gunung Tusang, Gunung Tantanggunta dan lainnya. Sejumlah sungai besar yang berada di wilayah ini

---

<sup>36</sup> Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Luwu Utara UU No. 13 Tahun 1999.

antara lain Sungai Salu Rongkong, Sungai Salu Kula, Sungai Salu Balease, Sungai Salu Karama, Sungai Salu Lodang dan lainnya.<sup>37</sup>

Penduduk Kabupaten Luwu Utara berjumlah 302.687 jiwa (laki-laki 151.993 jiwa dan perempuan 150.694) dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di Kecamatan Baebunta dan paling sedikit berada di Kecamatan Rampi serta terdiri dari 70.892 Kepala Keluarga. Sebagian besar (80,93%) penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tetapi kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2003 hanya 33,31% atau sebanyak Rp4,06 triliun. Adapun batas wilayah administratif Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi Barat

Iklim Luwu Utara termasuk iklim tropis, suhu udara minimum 25,30 0C dan suhu maksimum 27,90 0C dengan kelembaban udara rata-rata 83 %. Menurut pencatatan stasiun pengamatan ( SP ) Bone-Bone secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 9 hari dengan jumlah curah hujan 76. Stasiun Pengamatan Amasangan mencatat secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 8 hari dengan curah hujan 226. Sedangkan berdasarkan Stasiun Pengamatan Malangke secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 11 hari dengan jumlah curah hujan 247, dan

---

<sup>37</sup> Wikipedia, *Kabupaten Luwu Utara*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Luwu\\_Utara#cite\\_ref-3](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Utara#cite_ref-3), di Akses Pada Tanggal 10 Maret 2020.

Stasiun Pengamatan Sabbang mencatat bahwa secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 14 hari dengan jumlah curah hujan 256. Dari 11 Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Seko dengan luas 21.109,19 Km<sup>2</sup> dan luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Malangke Barat dengan luas 93,75 Km<sup>2</sup>.<sup>38</sup>

## 2. Profile Desa Rompu

### a. Sejarah Desa Rompu

Desa Rompu merupakan salah satu dari lima belas (15) Desa yang ada di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Desa Rompu terdiri dari Dua (2) Dusun yakni Dusun Pambusu dan, Dusun karre. Dilihat dari segi potensi yang dimiliki mayoritas Penduduknya berprofesi sebagai Petani. Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan Desa Rompu.

Awalnya Desa Rompu merupakan bagian dari kelurahan baliase dan saat itu masi disebut dusun rompu sehingga pada tahun 1994 memekarkan diri menjadi desa rompu yang terdiri dari dua dusun yaitu dusun pambusu dan dusun karre. Pada saat itu jabatan Kepala Desa dijabat oleh Bapak Buttang (Kades Pertama) kemudian pada tahun 1999 Bapak Buttang mengundurkan diri sebagai kepala desa dan dilanjutkan oleh sekretarisnya Abd Wahid sebagai pelaksana tugas (PLT) kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh bapak Abd. Muis setelah itu di lanjutkan kembali Oleh bapak syahrul dan sekarang dilanjutkan oleh Bapak Rusdi,S.Pd. sampai dengan saat ini.

---

<sup>38</sup> Provinsi Sulawesi Selatan, *Kabupaten Luwu Utara*, [https://sulselprov.go.id/pages/des\\_kab/10](https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/10), diakses pada tanggal 10 Maret 2020.

**Table 4.1. Sejarah Desa Rompu**

Tahun	Peristiwa	Keterangan
1994	Awalnya Desa Rompu merukan bagi dari Kelurahan Baliase kemudian pada tahun 1994 memekarkan diri menjadi Desa	Desa Rompu dimekarkan pada Tahun 1994
1994	Resmi dimekarkan menjadi Desa yakni Desa Rompu	Dan diberi nama Rompu
	Kepala Desa Rompu yang pertama Bapak Buttang mengundurkan diri dari Jabatan	Bapak Buttang digantikan Bapak Abdul Wahid
1999	Kepala Desa dan digantikan oleh Sekretaris Desa Bapak Abdul Wahid sebagai Pelaksana Tugas (PLT)	
2000	Dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah Bapak Abdul Muis	Kepala Desa Abdul Muis
2009	Dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah Bapak Syahrul	Kepala Desa Syahrul
2015	Masa Jabatan Kepala Desa Berakhir dan dilanjutkan oleh Bapak Andi Rahmat Purnama, S.STP Sebagai Pejabat Sementara (PJS)	Kepala Desa Syahrul digantikan PJS Bapak Andi Rahmat Purnama, S.STP
2016	Dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah Bapak RUSDI, S.Pd sampai sekarang	Dimenangkan Bapak RUSDI, S.Pd

**Sumber Data** : Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara

#### b. Letak Geografis

Secara geografis dan secara administratif Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu dari 166 Desa dan 7 Kelurahan di Kabupaten Luwu Utara. Desa Rompu berada Ibukota Kabupaten Luwu Utara yakni Kecamatan Masamba dengan jarak tempuh  $\pm 5$  Km. Desa ini



memiliki luas wilayah  $\pm 1.433.400 m^2$  dengan potensi lahan produktif berupa pertanian dan perkebunan.

Adapun batas-batas desa sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Pandak
- 2) Sebelah Timur : Desa Tarra Taluu
- 3) Sebelah Selatan : Desa Toradda
- 4) Sebelah Barat : Desa Pombakka

Secara administratif Desa Rompu terdiri atas 2 dusun, yaitu :

- 1) Dusun Pambusu
- 2) Dusun Karre

Secara umum, Tipologi desa Rompu terdiri dari persawahan, perkebunan, dan perdagangan. Topografis Desa Rompu secara umum termasuk daerah dataran dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Rompu diklasifikasikan pada dataran tanah rata.

#### c. Iklim

Keadaan iklim di Desa Rompu terdiri dari : Musim Hujan dan Musim Kemarau. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Februari – Juni, sementara musim kemarau terjadi antara Bulan Juli-Januari.

#### d. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanete dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat

<b>Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Belum masuk TK/Kelompok Bermain	175
Sedang D-3/Sederajat	3
Sedang S-1/Sederajat	46
Sedang S-2/Sederajat	0
Sedang SD/Sederajat	213
Sedang SLTA/Sederajat	43
Sedang SLTP/Sederajat	53
Sedang TK/Kelompok Bermain	23
Tamat D-2/Sederajat	1
Tamat D-3/Sederajat	23
Tamat S-1/Sederajat	65
Tamat S-2/Sederajat	3
Tamat SD/Sederajat	287
Tamat SLTA/Sederajat	432
Tamat SLTP/Sederajat	165
Tidak pernah sekolah	98
Tidak tamat SD/Sederajat	126
<b>TOTAL</b>	<b>1.756</b>

**Sumber Data** : Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara

e. Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil peninjauan diketahui bahwa jenis-jenis mata pencaharian pokok di desa Tanete dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.3 Mata Pencaharian

<b>Rekapitulasi Penduduk Berdasa Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
Belum Bekerja	292
Bidan Swasta	0
Buruh Harian Lepas	93
Buruh Tani	86
Guru Swasta	19
Ibu Rumah Tangga	379
Karyawan Perusahaan Swasta	29
Karyawan Swasta	17
POLRI	1
Pedagang Barang Kelontong	12
Pegawai Negeri Sipil	13
Pelajar	327
Pembantu Rumah Tangga	0
Perangkat Desa	13
Perawat Swasta	1
Petani/Peternak	378
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	23
Tukang Batu	17
Wiraswasta	45
Purnawirawan/Pensiunan	11
<b>TOTAL</b>	<b>1.756</b>

**Sumber Data** : Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara  
f. Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan tanah umumnya digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Untuk lahan pertanian dilakukan 2 kali masa panen setiap tahunnya. Sementara untuk lahan perkebunan lebih banyak tanaman jagung yang dipanen setiap 3 bulan dan tanaman kakao yang dipanen setiap bulan.

g. Sarana dan Prasarana

Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Desa

<b>Keberadaan Sarana dan Prasarana Desa</b>	<b>Keterangan</b>
Kantor Desa	Ada
Kantor BPD	Ada
Kantor Kepala Dusun	Tidak Ada
Balai Desa	Ada
Sekolah	2 Unit
Masjid	5 Unit
Jalan Kabupaten	0 Km
Jalan Kecamatan	0 M
Jalan Desa	65 Km
Lapangan Olah Raga	1 Unit
Gereja	0 Unit

**Sumber Data** : Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara

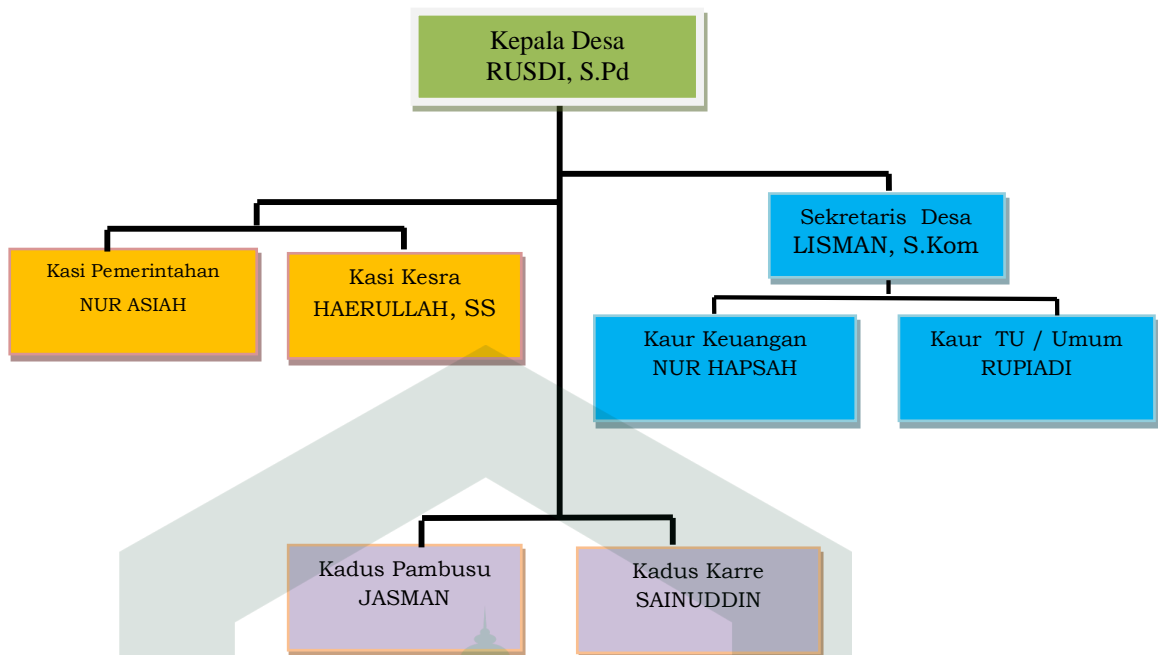
h. Pembagian Wilayah Desa dan Jumlah Penduduk

Tabel 4.5 Pembagian Wilayah Desa

<b>Nama Dusun</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah KK</b>
Pambusu	463	524	987	214
Karre	315	454	769	132
<b>TOTAL</b>	<b>778</b>	<b>978</b>	<b>1.756</b>	<b>446</b>

**Sumber Data** : Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara

i. Struktur Organisasi dan Tata Letak Pemerintah Desa



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rompu  
Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara**

#### **Pengurus BPD**

Ketua : Johan  
 Wakil Ketua : Janti  
 Sekretaris : Suharni  
 Anggota : 1. Rahman  
 2. Ancos

**IAIN PALOPO**

#### **Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)**

Kader Teknik : Herli  
 Kader Pemberd.: Suharni

#### **Kelompok PKK**

Ketua : Husniati

Sekretaris : Herni  
 Bedahara : Misna  
 Anggota : 1. Masria  
 2. Sinta

### **Kelompok Tani**

Jumlah kelompok tani yang ada di desa Tanete ada 10, yaitu:

1) Kelompok tani Sawerigading	6) Kelompok Tani Sikamase
2) Kelompok tani Bunga Coklat	7) Kelompok tani Mabarakka'e
3) Kelompok tani Baselle	8) Kelompok tani Sipatokkong
4) Kelompok tani Sinura	9) Kelompok tani Kwt Karre Indah
5) Kelompok tani Sipatuo	10) Kelompok tani Pemuda Tani

### **Majelis Ta'lim**

Ketua : Hj. Udamia  
 Sekretaris : Husniati  
 Bendahara : Hasmita

### **B. Hasil Penelitian**

#### **1. Pengaruh PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara**

Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan hal yang kompleks. Agar tingkat kemiskinan dapat menurun, maka diperlukan dukungan dan kerja sama baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sejak tahun 2007, pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Program tersebut adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Salah satu implementasi dari program PNPM ini ditujukan untuk masyarakat pedesaan, dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.<sup>39</sup>

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan terdapat Undang – undang, Peraturan dan Keputusan Presiden/ Menteri Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- d. PP No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- e. PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa
- f. PP No.2 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
- g. PP No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- h. Perpres No. 54 Th 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- i. UU No.14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- j. PP No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

---

<sup>39</sup> Aziz Ahmadi, "Implementasi Weighted Product (WP) dalam Penentuan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan", *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)* Yogyakarta, ISSN: 1907 – 5022, 2014, 19.

k. PTO PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2008.<sup>40</sup>

Program PNPM memberikan pengaruh yang positif dilingkungan masyarakat. hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan-bantuan yang telah disalurkan terhadap masyarakat daerah dusun Pambusu Desa Rompu yang mana berdampak pada kesejahteraan masyarakat. kebanyakan masyarakat di dusun pambusu telah merasakan bantuan dari program PNPM sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar dusun tersebut. hal ini sesuai yang telah diterangkan oleh salah satu warga masyarakat dusun pambusu yang bernama Sudirman, mengatakan bahwa :

“saya selaku warga masyarakat dusun pambusu merasa bahagia dan bersyukur dengan adanya bantuan dari program PNPM di desa kami yang telah membantu perekonomian saya dikeluarga. Dan juga saya berharap kedepannya program PNPM lebih maju lagi agar masyarakat seperti saya dapat merasakan bantuan PNPM menuju masyarakat yang sejahtera dan jauh dari kata kekurangan.”<sup>41</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa keberadaan program PNPM di tengah lingkungan masyarakat dusun pambusu itu sangat bermanfaat untuk menunjang perekonomian warga sekitar. Hal tersebut dapat diartikan bahwa PNPM sangat berpengaruh penting terhadap kesejahteraan masyarakat di Dusun Pambusu.

Dalam Analisis Tematik ini, gambaran tentang kesejahteraan Desa dilihat dari Indeks Kemandirian Desa yang dapat mengukur hasil pembangunan suatu desa. Indeks Kemandirian Desa ini dibentuk dari 3 dimensi yaitu:

<sup>40</sup> Bram Christanto, “Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan”, *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* ISSN : 2302-2752, Vol. 4 No. 3, 2015, 119.

<sup>41</sup>Sudirman, Masyarakat Desa Rompu. *Wawancara*. Tanggal 12 Februari 2020.



a. Indeks Kemampuan Sendiri (Input), yang mencakup :

- (1) Variabel Kebutuhan Dasar, meliputi fasilitas perumahan, fasilitas infrastruktur, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kelembagaan sosial, fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan fasilitas keamanan
- (2) Variabel Fasilitas Pemerintahan Desa, meliputi fasilitas politik dan tata pemerintahan
- (3) Variabel Ekonomi, meliputi fasilitas daya saing ekonomi

b. Indeks Tanggung Jawab Bersama (Proses), yang mencakup :

- (1) Variabel Kegiatan Kemasyarakatan, meliputi kegiatan perumahan, kegiatan infrastruktur, kegiatan kesehatan, kegiatan pendidikan, kegiatan kelembagaan sosial, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kegiatan keamanan
- (2) Kegiatan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan politik dan tata pemerintahan
- (3) Kegiatan Ekonomi, meliputi kegiatan usaha ekonomi

c. Indeks Keberlanjutan (Outcome), yang mencakup :

- (1) Variabel Manfaat Kebutuhan Dasar, meliputi manfaat hasil dan kegiatan perumahan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kelembagaan sosial, pengelolaan lingkungan hidup dan keamanan
- (2) Variabel Manfaat Pemerintahan Desa, meliputi manfaat hasil dan kegiatan politik dan tata pemerintahan
- (3) Variabel Manfaat Ekonomi, meliputi manfaat dan hasil kegiatan pengembangan ekonomi.

Indeks Kemandirian Desa ini berada dalam rentang 0,00 – 1,00, dengan kategori indeks sebagai berikut :

Tinggi :  $> 0,81 - 1,00$

Sedang :  $> 0,61 - 0,80$

Rendah :  $> 0,41 - 0,60$

Sangat Rendah :  $0,00 - 0,40$ <sup>42</sup>

Jadi jika dilihat dari data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dusun Tambusu Desa Rompu itu mempunyai indeks kemandirian desa sebesar 0,42 dan itu artinya berada pada kategori sedang.

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila mampu membiayai kehidupannya dan jauh dari kata kekurangan. Sebab apabila masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhannya dengan hasil kerjanya maka hal tersebut sudah layak dikatakan sejahtera. Arti sejahtera itu tidak selalu menyangkut tentang banyaknya harga seseorang melainkan dilihat pada kecukupan dalam kebutuhannya. Banyak persepsi yang salah tentang masyarakat sejahtera. Salah satunya adalah sejahtera apabila mempunyai segalanya dan dapat membeli segalanya. Padahal arti sejahtera yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa merasa kesulitan. Namun pada kenyataannya di Indonesia khususnya Dusun Pambusu desa Rompu Kabupaten Luwu Utara masih banyak masyarakat yang jauh dari kata masyarakat sejahtera dan inilah pentingnya keberadaan PNPM ditengah kondisi masyarakat tersebut yang akan

---

<sup>42</sup>Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan/ Ivanovich Agusta dan Fujiartanto (ed.); ed.1- Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014

memberikan bantuan untuk masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat di pedesaan.

Keberadaan PNPM di tengah masyarakat itu selalu memberikan yang terbaik. Terlihat jelas dalam proses perencanaan program PNPM Mandiri Perdesaan, sesuai yang telah di terangkan oleh Bapak Rusdi, S.Pd selaku Kepala Desa di Desa Rompu menjelaskan bahwa :

“untuk merencanakan suatu program yang akan di danai pemerintah. Pengelola merapatkan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan program antara lain dari tenaga pendamping maupun konsultan untuk membantu kelompok masyarakat di Desa Rompu membuat proposal suatu program kegiatan. Tim Pemberdayaan Masyarakat bersama dengan Tenaga Pendamping melaksanakan kegiatan identifikasi, seleksi dan verifikasi serta membuat usulan kelompok untuk ditetapkan menjadi kelompok penerima Bantuan Langsung Masyarakat oleh Kuasa Pengguna Seperti itulah perencanaan program kegiatan PNPM Mandiri di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.”<sup>43</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terjadinya proses perencanaan yang sistematis, dimana pihak pengelola terlebih dahulu merapatkan program-program yang direncanakan dengan masyarakat agar nantinya program tersebut berjalan dengan baik. Hal tersebut juga di perjelas oleh Bapak Asruddin, S.P selaku masyarakat yang turut andil dalam pelaksanaan program PNPM di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara :

“Bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi berjenjang dengan menggunakan metode pendekatan secara berkelompok-kelompok yang mana tidak terlalu terfokus pada masyarakat secara keseluruhan dan pelaksanaannya bekerja secara bersama-sama. Adanya motivasi dari masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam

---

<sup>43</sup> Rusdi. Kepala Desa Rompu. *Wawancara*. Tanggal 12 Februari 2020.

mengikuti program kegiatan PNPM Mandiri tidak terlepas dari adanya kebutuhan masyarakat akan program kegiatan pemberdayaan”.<sup>44</sup>

Kehadiran Program PNPM Mandiri di Desa Rompu Kecamatan Masamba, ini memberikan harapan baru masyarakat untuk kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan. Antusiasme ini membuat masyarakat sangat antusias untuk terlibat dalam setiap tahapan program mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan fisik. Sejak awal program ini tim pendamping menginformasikan mengenai pentingnya keterlibatan kaum perempuan dan merupakan salah satu faktor suksesnya program maka dengan bantuan aparat desa dan tokoh masyarakat bersama-sama mengerakkan kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pogram ini. Maka dari itu perempuan sangat aktif dalam setiap tahapan kegiatan terutama kegiatan-kegiatan musyawarah sehingga pada saat pemilihan jenis kegiatan kaum perempuan turut serta memberikan pendapatnya dan akhirnya dipilihlan infrastruktur jalan, Rainase dan gorong-gorong sebagai rencana kegiatan program. Selain terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan musyawarah kaum perempuan juga dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terutama pekerjaan pembangunan jalan, dekker Rumah. Meskipun mereka belum terbiasa melakukan pekerjaan ini namun mereka berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya meskipun waktu mereka terbatas selain untuk mengurus keluarga dan pekerjaan lain sebagai buruh tani. Ini mereka lakukan demi keberlanjutan Program PNPM Mandiri di desa mereka dan untuk mendukung pembangunan dan kemajuan desa.

---

<sup>44</sup> Asruddin, Masyarakat Desa Rompu. *Wawancara*. Tanggal 12 Februari 2020.

Untuk upaya pengentasan keluarga miskin yang sifatnya sementara, program pengentasannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah kemiskinan itu terjadi. Pendekatan yang kedua, yaitu upaya rehabilitasi atau penyembuhan masyarakat dari kemiskinan, merupakan pendekatan yang populer dilakukan di Indonesia. Untuk bentuk kemiskinan yang kedua, karena sifatnya yang permanen dan sering terjadi secara turun temurun, maka pendekatan yang dilakukan tidaklah sama. Satu-satunya cara yang paling efektif untuk meningkatkan taraf hidupnya ialah melalui pendidikan. Pendidikan di sini bukan hanya sebatas mengikuti program wajib belajar atau menjadi siswa di lembaga-lembaga pendidikan formal, mengingat biaya pendidikan formal yang berkualitas saat ini sangat tinggi, sehingga sulit dicapai oleh masyarakat miskin pada umumnya. Pendidikan di sini diartikan sebagai segala upaya pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga membuatnya mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup, antara lain memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh rasa aman, dan berpartisipasi lebih dalam lingkungan sosial. Upaya pemberdayaan tersebut bisa beragam, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Adapun upaya untuk pengentasan keluarga miskin dalam program PNPM yang telah dilaksanakan adalah melalui:

- a. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BLT adalah singkatan dari Bantuan Langsung Tunai, merupakan suatu program dari pemerintah yang bertujuan untuk mengangkat perekonomian rakyat kurang mampu. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebuah program kompensasi untuk kelompok termiskin ketika terjadi sebuah guncangan ekonomi yang bisa

mempengaruhi kesejahteraan kelompok itu. Sebagai sebuah program kompensasi, tujuan BLT tentu bukanlah menurunkan tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Fungsi BLT adalah menjaga tingkat konsumsi kelompok termiskin – yang umumnya tidak punya mekanisme lain seperti tabungan atau akses ke pinjaman untuk menjaga tingkat konsumsi ketika guncangan ekonomi terjadi. Program kompensasi juga sifatnya sementara.

- b. Melalui Program Bantuan Perorangan/Kelompok Selama ini orientasi dari sebuah usaha adalah untuk mencari keuntungan semata (*profit-oriented*). Prinsip dasar yang kemudian diterima secara luas dalam dunia usaha adalah *business is business*. Belakangan ini bersama dengan tampilnya etika bisnis, orang mulai menyadari adanya keterkaitan antara nilai-nilai spiritualitas dengan keberlanjutan dan perkembangan sebuah usaha. Dalam konteks spiritual bisnis, bisnis bukan hanya semata-mata persoalan memaksimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan. Singkatnya, para insan bisnis harus sadar akan nilai-nilai pragmatik nilai-nilai (*the pragmatic value of values*). Dalam konteks ini, bisnis bukan hanya semata-mata persoalan memaksimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan. Tapi bagaimana bisnis yang dijalankan bisa mendatangkan keuntungan yang maksimum bagi pemilik perusahaan yang didapatkan dan dicapai dengan cara lebih memanusiakan manusia, dan melakukan langkah-langkah yang harmonis dengan seluruh stakeholder. Salah satu kontribusi yang diberikan oleh pihak penbisnis baik secara perusahaan maupun individu adalah

dengan memberikan bantuan kemanusiaan , dalam hal ini adalah mereka yang memiliki usaha sarang burung walet disekitar masyarakat.

- c. Memberdayakan Masyarakat Lokal Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan. Sumberdaya pembangunan yang utama adalah modal, termasuk didalamnya kepintaran, ketrampilan, informasi dan teknologi di samping dana dan tanah. Untuk merangsang lahirnya gerakan masyarakat yang bermula pada kumunitas lokal, ada prinsip kebersamaan demi mewujudkan semangat dan kegiatan kooperatif. Dalam kebersamaan, tiap-tiap anggota ikut bertanggung jawab, saling mempercayai dan saling melayani. Kondisi ini merupakan prasyarat yang penting di dalam proses koniistentisasi.

Di samping itu program-program yang bergulir memang merupakan prioritas kebutuhan dari masing-masing anggota kelompok dengan tidak mengabaikan kepentingan individu dan mempertimbangkan kesesuaian potensi, kondisi, dan permasalahan yang terdapat di masing-masing daerah. Selain dilakukan dengan pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama, diperlukan arah baru kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan

pemerataan guna menunjang eksistensi kelompok tersebut, yaitu suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat.<sup>45</sup>

Menurut Bapak Rusdi, S.Pd selaku Kepala Desa di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa :

“Pengaruh PNPM Mandiri di Desa Rompu sangat baik karena selama ada program PNPM dari Pemerintah infrastruktur di Desa Rompu meningkat seperti sudah ada drainase yang di buat di sekitar jalan Desa Rompu, selain itu program PNPM juga berpengaruh besar terhadap pendidikan, dengan mendirikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan TK, serta memberikan pengaruh yang positif terhadap perekonomian masyarakat dengan adanya program simpan pinjam yang juga merupakan salah satu program dari PNPM di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”.<sup>46</sup>

Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam program PNPM yakni partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan dan ikut dalam pengambilan keputusan, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan program, dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan termasuk dalam kategori tinggi, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program PNPM-MP termasuk dalam kategori sedang dan tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan swadaya termasuk dalam klasifikasi rendah.<sup>47</sup>

## **2. Faktor pendorong dan penghambat dalam menyalurkan Program PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara**

---

<sup>45</sup> Wan Adnan, “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Memanfaatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Pedesaan”, *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIS-2012*, 7-8.

<sup>46</sup> Rusdi. Kepala Desa Rompu. *Wawancara*. Tanggal 12 Februari 2020.

<sup>47</sup> Andika Rismayanti Hadi, ” Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kpmd) Dan Partisipasi Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus”, *Jurnal JIIA*, VOLUME 1 No. 1, JANUARI 2013. 71.



Adapun yang menjadi faktor pendorong dalam rangka menyalurkan Program PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara adalah Sikap kelompok masyarakat di desa Rompu ini pada saat pelaksanaan PNPM Mandiri sangat membantu dengan sumber belajar yang ada melalui pendampingan oleh konsultan. Faktor yang mendukung PNPM Mandiri di Desa Rompu adalah faktor partisipasi serta kemauan dari kelompok masyarakat untuk belajar. Hal ini sangat mendukung berhasilnya suatu program dengan secara tidak memaksa untuk mengikuti pemberdayaan ini.

Menurut kelompok masyarakat dengan adanya PNPM Mandiri di Desa Rompu telah dapat menciptakan lapangan kerja baru karena dengan keterampilan yang mereka miliki diharapkan mampu membuat perubahan di Desa Rompu terutama pada bidang pertanian dan hasil laut Nelayan. Hal ini dibuktikan peneliti ketika mewawancarai Bapak (Rusdi, S.Pd) selaku Kepala Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa :

“yang saya harapkan nanti adanya lapangan kerja, karena kan masyarakat disini banyak yang berpengalaman dalam bercocok tanam dan menangkap hasil Laut, trus juga ada beberapa kelompok yang mendapat bantuan, harapan saya dan seluruh masyarakat nantinya bisa berkembang lebih baik lagi kedepannya”.<sup>48</sup>

Jalanan kemitraan sangat dibutuhkan setelah selesainya PNPM Mandiri. Hal ini diwujudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam mengurangi kesenjangan kelompok masyarakat pada utang yang mungkin saja bisa membelit mereka. Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Desa Rompu selama

---

<sup>48</sup> Asruddin, Masyarakat Desa Rompu. *Wawancara*. Tanggal 12 Februari 2020.

ini adalah yang menjembatani antar kelompok masyarakat. Segala kegiatan ada di koperasi tersebut baik sebagai wadah pertemuan maupun masalah simpan pinjam di kalangan kelompok masyarakat khususnya di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Sedangkan untuk faktor penghambat dalam rangka menyalurkan Program PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara adalah terbatasnya dana PNPM Mandiri, karena tidak semua kelompok mendapatkan dana PNPM Mandiri. Semua kelompok masyarakat harus lolos seleksi dan verifikasi untuk mendapat dana BLM PNPM Mandiri. Sehingga ada sebagian kelompok masyarakat yang ikut berpartisipasi merasa kecewa karena tidak mendapat dana BLM PNPM Mandiri.

Selain itu, juga diterangkan oleh Bapak Rusdi, S.Pd selaku Kepala Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

“kondisi cuaca juga menjadi faktor Penghambat dalam menyalurkan program PNPM Mandiri di Desa Rompu. Seperti salah satu contohnya ketika membuat drainase, pembangunan gedung PAUD, TK serta jalan tani semua program tersebut tidak akan berjalan lancar apabila kondisi cuaca yang buruk (Hujan) yang mempengaruhi proses pelaksanaan program PNPM”.<sup>49</sup>

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Rompu tentunya menjadi perhatian dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri. Banyak hal yang bisa diungkap selama pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Rompu, terutama hambatan yang terjadi pada kelompok masyarakat penerima BLM PNPM Mandiri. Pada dasarnya masih rendahnya pemahaman tentang PNPM Mandiri banyak terjadi di tingkat aparatur maupun

---

<sup>49</sup> Rusdi. Kepala Desa Rompu. *Wawancara*. Tanggal 12 Februari 2020.

masyarakat. Sehingga perlu ditindaklanjuti dalam memecahkan masalah dengan solusi yang terbaik bagi pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Rompu.



**IAIN PALOPO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Sesuai dengan uraian hasil pembahasan dan penelitian penulis mengenai “Pengaruh Program PNPM Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Program PNPM Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara memberikan pengaruh yang sangat baik karena dengan adanya program PNPM tersebut kondisi perekonomian masyarakat di Desa Rompu jauh lebih baik dari sebelumnya serta infrastruktur seperti jalan tani dan pembangunan PAUD serta drainase memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Rompu.
2. Faktor pendorong dan penghambat dalam menyalurkan program PNPM Mandiri terhadap Masyarakat di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yaitu faktor pendukung salah satunya adalah tersedianya program dapat membantu masyarakat Desa seperti Koperasi Simpan Pinjam, selain itu kontribusi masyarakat dan Pemerintah juga menjadi faktor pendorong yang sangat penting dalam menyalurkan program PNPM Mandiri di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan faktor penghambat dalam penyaluran program

PNPM adalah cuaca serta kecemburuan sosial yang terjadi antar masyarakat setempat Desa Rompu.

## **B. Saran**

Sejalan dengan apa yang diperoleh dari penelitian ini supaya tercapai hasil yang optimal, maka dalam penelitian ini dikemukakan beberapa saran sebagai rekomendasi tentang Pengaruh Program PNPM Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara :

1. Diharapkan bagi masyarakat Desa Rompu agar lebih meningkatkan partisipasi dalam pembetulan program PNPM Mandiri, karena kontribusi serta apresiasi yang tinggi dari masyarakat juga akan berpengaruh besar terhadap lancarnya program PNPM.
2. Pemerintah sebaiknya dalam strategi PNPM Mandiri tidak hanya membentuk kelompok saja dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, namun juga pemerintah harus memberikan dukungan secara komprehensif yaitu secara menyeluruh pemberian pengetahuan dan bimbingan bidang usaha perekonomian juga harus menyentuh kelompok masyarakat yang lain yang tidak ikut PNPM Mandiri karena kebutuhan mereka akan pengembangan usaha bidang perekonomian masih jauh dari harapan.
3. Diharapkan bagi peneliti maupun segenap pembaca untuk dapat merealisasikan aturan-aturan hukum yang telah berlaku karena sebagai generasi bangsa itu mempunyai tugas untuk memajukan bangsa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aburizal Bakrie, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Jakarta: Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007.
- Andika Rismayanti Hadi, ” Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kpmd) Dan Partisipasi Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus”, *Jurnal JIA*, VOLUME 1 No. 1, JANUARI 2013. 71. <http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/viewFile/133/137>.
- Asruddin, Masyarakat Desa Rompu. *Wawancara*. Tanggal 12 Februari 2020.
- Aziz Ahmadi, ”Implementasi Weighted Product (WP) dalam Penentuan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan”, *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) Yogyakarta*, ISSN: 1907 – 5022, 2014, 19. <file:///C:/Users/USER/Downloads/3231-4146-1-PB.pdf>.
- Baharuddin, “*Dampak Sosial Ekonomi proyek pemberdayaan PNPM Mandiri Pedesaan dalam kehidupan masyarakat di kelurahan Je’nebatu Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*”, <http://repository.unhas.ac.id/>.
- Bram Christanto, “Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan”, *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang ISSN : 2302-2752*, Vol. 4 No. 3, 2015.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Pnpm Mandiri Perdesaan*, <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pnpm-mandiri-perdesaan-51>,
- Babadu, J.S dan Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Luwu Utara UU No. 13 Tahun 1999.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,PENJELASAN Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI PERDESAAN, penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- Direktorat Jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.

Duniapelajar.com, *Pengertian Pengaruh Menurut Para Ahli*, <http://www.duniapelajar.com/2014/08/07/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli/>, diakses pada 10 Januari 2020 pukul 12.01.

Freddy H. Tulung, *“Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II”*, Jakarta: Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, 2011.

Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/03/17/indikator-kesejahteraan>.

Hugiono dan Poerwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: PT Bina Aksara, 2000.

Israyanti, *“Strategi Komunikasi Dalam Mengimplementasikan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan (Studi di Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)”*, <http://repository.unhas.ac.id/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Manfaat*, <https://kbbi.web.id/manfaat>, Diakses pada tanggal 29 Januari 2020.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012.

Kusumastanto, T. 1998. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Berbasis Masyarakat*. PKSPL-IPB - Ditjen Bangda Depdagri.

Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Depok: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 2000.

Marliati A Harsono, *“Kemiskinan Perkotaan: Penyebab dan Upaya Penanggulangannya”*, *Makalah*, Institut Pertanian Bogor, 2005.

Mustika Rihadini, *“Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Pnpm Mp Spp) Di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara Pada Periode 2010”*, <http://repository.unhas.ac.id/>.

Nurjannah Nonci, *Implementasi Program Gernas Kakao: Studi Kebijakan Program Gernas Kakao di Kabupaten Luwu*, Makassar: CV Sah Media 2017.

Pedoman PNPM-Mandiri Perdesaan tahun.

2013. Provinsi Sulawesi Selatan, *Kabupaten Luwu Utara*,  
[https://sulselprov.go.id/pages/des\\_kab/10](https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/10), diakses pada tanggal 10 Maret 2020.

Rusdi. Kepala Desa Rompu. *Wawancara*. Tanggal 12 Februari 2020.

Solikatun, Supono, Yulia Masrurroh, Ahmad Zuber, *Kemiskinan dalam Pembangunan*,  
*Jurnal Analisa Sosiologi*, April 2014, Vol 3, No. 1.

Tridoyo Kusumastanto, "*Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Laut Dalam Abad XXI*" <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20-%20tridoyo%20kusumastanto.pdf>.

Universitas Tarumanagara, *Pemulungdi Jakarta*, Jakarta: Universitas Tarumanagara, 1995.

Wan Adnan, "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Memanfaatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Pedesaan",  
*Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIS-2012*.  
<file:///C:/Users/USER/Downloads/1053-3292-1-PB.pdf>.

Wikipedia, *Kabupaten Luwu Utara*,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Luwu\\_Utara#cite\\_ref-3](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Utara#cite_ref-3).

Wikipedia, *PNPM Mandiri Perdesaan*, [https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM\\_andiri\\_Pedesaan](https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_andiri_Pedesaan).

Wismoyo Ade Zaputro, "*Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*", <http://repository.unhas.ac.id>.

Yosi Abdian Tindaon, *Pengertian Pengaruh*,  
<http://yosiabdiantindaon.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-pengaruh.html>,  
 diakses Pada 10 Januari 2020 pukul 11.58.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**IAIN PALOPO**

IlhamS.,Ag.,M.A  
Mujahidin.,LC.,M.E

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :  
Hal : Skripsi an. Ricky rahman

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan. Baik dari segi isi, bahasa maupun teknik tulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Ricky rahman  
Nim : 14.16.4.0119  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul skripsi : **pengaruh program PNPM mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat di dusun pambusu desa rompu kabupaten Luwu Utara**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk ujian Munaqasyah.

Demikianlah disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

Ilham,S,Ag.,M.A  
Tanggal :

Pembimbing II

Mujahidin,LC.,M.E  
Tanggal :

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul : "PENGARUH PROGRAM PMPN MANDIRI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DUSUN PAMBUSU DESA ROMPU KABUPATEN LUWU UTARA"

Nama : Ricky Rahman

NIM : 14.16.4.0119

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada Ujian *Munaqasyah*

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 31 Mei 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Ilham, S.Ag., M.A.

Tanggal:



Mujahidin, Lc., M.E.

Tanggal:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon (0471) 22076  
 Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

Nomor : 065 /In.19/F.EBI/PP.00.9/02/2020

25 Februari 2020

Lamp : 1 Exempler

Perihal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
 Kepala DPMPTSP Luwu Utara  
 Di -

Masamba

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama	: Ricky Rahman
Tempat/Tanggal Lahir	: Rumpu, 01 Mei 1995
NIM	: 14.16.4.0119
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Ekonomi Syariah.
Semester	: XI ( Sebelas )
Tahun Akademik	: 2019/2020
Alamat	: Lemo-Lemo Balandai Kota Palopo

akan melaksanakan penelitian di Desa Rompu, dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul **"Pengaruh Program PNPMM Mandiri terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu kabupaten Luwu Utara"**.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Ramiah M, M.M.

IAIN PALOPO

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusdi, S.Pd  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Alamat : Desa Rompu

Menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini:

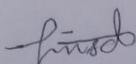
Nama : Ricky Rahamn  
NIM : 14 16 4 01 19  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Rompu, Masamba

Benar-benar ini telah mengatakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul ***"Pengaruh Program PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara"***.

Demikian keterangan ini kami memberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# IAIN PALOPO

Masamba, 26. Okt 2020

  
Rusdi, S.Pd



Dokumentasi wawancara



**IAIN PALOPO**

## RIWAYAT HIDUP



**Ricky Rahaman**, Lahir pada tanggal 01, Bulan 05, Tahun 1995, Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Rahman dan ibu Bungadia. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Rompu, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2008 di SDN 097 Rompu Kec. Masamba Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTSN Masamba hingga tahun 2011, Pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan di MAN Masamba hingga pada tahun 2014. Setelah lulus MAN Masamba di tahun 2014, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Palopo.

**IAIN PALOPO**

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :  
Hal : skripsi a.n. Ricky Rahman

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Ricky Rahman
NIM	: 14.16.4.0119
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Pengaruh program PNPB mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat di dusun Pambusu desa Rompu kabupaten Luwu Utara

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

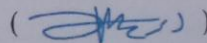
1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

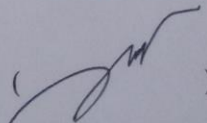
*Wassalamu 'alaikum wr. Wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Abd. Kadir Arno, SE., M.Si  
Tanggal :

(  )

2. Kamriani, S.Pd.  
Tanggal : 05 Maret 2021

(  )



Ilham, S.Ag., M.A  
 Mujahidin, LC., M.E  
 Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.Ei., M.A  
 Dr. Adzan Noor Bakri, M.A., Ek

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :  
 Hal : Skripsi an. Ricky Rahman

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : Ricky Rahman  
 Nim : 14.16.04.0119  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Judul skripsi : **Pengaruh program PNPM mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat di Dusun pambusu Desa Rompu Kabupaten Luwu Utara.**

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diujikan untuk pada ujian *munaqasyah*.

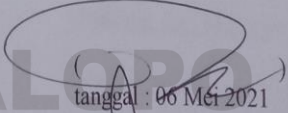
Demikianlah disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

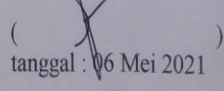
1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.Ei.,M.A  
 Penguji I

()  
 tanggal : 06 Mei 2021

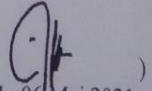
2. Dr. Adzan Noor Bakri, M.A., Ek  
 Penguji II

()  
 tanggal : 06 Mei 2021

3. Ilham, S.Ag.,M.A.  
 Pembimbing I/Penguji

()  
 tanggal : 06 Mei 2021

4. Mujahidin, LC.,M.E  
 Pembimbing II/Penguji

()  
 tanggal : 06 Mei 2021